

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, laporan keuangan pemerintah sangat menarik untuk dikaji, mengingat semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. (Adi & Dr. Edy Sujana, 2023)

Undang-undang No. 17 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2003 menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan pemerintah daerah dengan menyajikan laporan keuangan. Hal ini

tentunya dapat terjadi jika entitas pemerintah daerah mampu membuat, mengoperasikan serta menjaga kualitas laporan keuangan.

Undang-undang No. 17 pasal 16 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggung jawabannya menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sesuai dengan peraturan tersebut, pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas publik menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah, sehingga disinilah dampak strategisnya pada peran pengawasan dan juga peran setiap instansi atau SKPD dapat terlihat.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Azlim et al., 2012). Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan ketertiban pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. (Pilander et al., 2018)

Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat juga apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Putriasri & Taman, 2017)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan paragraf 35 terdapat karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Terdapat empat karakteristik yang merupakan persyaratan normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan, memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat predikat, tepat waktu, lengkap, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Mona Nur Adhillah, 2022).

Ketentuan penerapan SAP sebagai sebuah sistem pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas bagi pemerintah pusat/daerah, sehingga dibangunlah suatu sistem akuntansi yang baik, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang SAP dalam pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah, dalam pasal 1 ayat 4 yang menjelaskan bahwa SAP Berbasis Aktual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,

utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin transparan dan akuntabel yaitu dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Mulyadi dan Haryoso, 2019).

Dari sisi pemakaian eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan. Laporan Keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian Negara/lembaga, dan Laporan Keuangan pemerintah daerah (Indra Bastian, 2010).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena SPIP menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya,

menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi pada laporan keuangan.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Lisda et al., 2018)

Dalam pernyataan lingkungan pengendalian, instansi pemerintah akan meningkatkan kedisiplinan karyawan dengan menerapkan kode etik secara tertulis dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan transaksi – transaksi yang benar terjadi sehingga informasi dalam laporan keuangan menggambarkan secara jujur/wajar dan membuat laporan keuangan menjadi relevan dan andal sehingga semakin baik penerapan SPIP maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. (Ardianto & Chermian Eforis, 2019)

Kompetensi yang tepat merupakan faktor yang menentukan keunggulan prestasi dapat dimiliki organisasi apabila organisasi tersebut memiliki fondasi yang kuat, tercermin pada seluruh proses yang terjadi dalam organisasi yang artinya organisasi harus memiliki kompetensi inti (*corecompetency*) yang kuat sesuai dan sesuai dengan bisnis inti (*corebusiness*). Kompetensi inti merupakan komponen pembentuk misi dan budaya organisasi, (Muhammad, 2018). Dalam rangka

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif.

Kompetensi SDM adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugasnya (Yensi 2014). SDM yang berkompeten dapat bertanggung jawab atas tugas yang dikelolanya akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku secara lengkap dan wajar dan membuat laporan keuangan relevan dan andal, sehingga semakin baik kompetensi SDM, kualitas laporan keuangan semakin meningkat. (Ardianto & Eforis, 2019)

Ketidapahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa Kualitas kompetensi Pegawai ASN yang beragam mengharuskan instansi pemerintah melaksanakan program pengembangan kompetensi pegawai secara reguler sebagai kebijakan yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Dan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 70 ayat (1) dan (2) tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 1 ayat 14 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). (Putriasri & Taman, 2017)

Pada semester I tahun 2023, BPK memeriksa 542 (100%) LKPD Tahun 2022 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2022. Sejak tahun 2015, seluruh pemda telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022 meliputi Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2022, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 496 (91%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 41 (8%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 5 (1%) LKPD. Dari data tersebut maka perludanya perbaikan agar capaian Wajar Tanpa Pengendalian (WTP) dapat ditingkatkan atau dipertahankan dimasa yang akan datang. Hal tersebut dimaksudkan agar terwujudnya tata kelola dan tanggungjawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Dari 542 LKPD Tahun 2022 yang diperiksa BPK, sebanyak 46 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 41 WDP dan 5 TMP. LKPD Tahun 2022 belum memperoleh opini WTP atau mengalami penurunan opini karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2022 diantaranya ada pada permasalahan penyajian belanja modal yang terjadi pada 16 pemda, yaitu terdapat kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, penyimpangan dan ketidakefektifan sistem pengendalian intern, serta proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak mematuhi ketentuan, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah, dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan melampaui APBD TA 2022, serta pelaksanaan pekerjaan belanja modal dilakukan dengan pemecahan kontrak yang diindikasikan untuk menghindari ketentuan pelelangan, dilakukan tanpa analisis kebutuhan, dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak berdasarkan survei harga pasar.

Selain itu, adanya permasalahan penyajian belanja operasi yang terjadi pada 19 pemda yaitu realisasi belanja barang dan jasa yang terdiri atas belanja perjalanan dinas, realisasi belanja hibah serta realisasi belanja pegawai berupa pembayaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) tidak melalui persetujuan menteri dalam negeri (BPK RI, 2023).

Selain adanya permasalahan dalam penyajian laporan keuangan, BPK juga mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 5.628 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) yang meliputi 1.695 (30%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.974 (53%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 959 (17%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian internal.

Permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal tersebut yaitu kelemahan struktur pengendalian intern yang terjadi pada 391 pemda, salah satu permasalahannya yaitu SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 253 pemda. Permasalahan itu salah satunya terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Bantul belum disusun/tidak lengkap, antara lain berupa:

1. Mekanisme pendataan dan kriteria usaha hotel dan restoran yang seharusnya menjadi wajib pajak;
2. Mekanisme pemusnahan barang persediaan yang rusak atau kedaluwarsa;
3. Mekanisme pengadaan tenaga ahli;
4. Mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan Jamkesda secara periodik.

Selain itu, permasalahan diatas juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Mempawah, antara lain berupa:

1. Mekanisme penatausahaan atas pendapatan BLUD;
2. Peraturan bupati yang mengatur perincian honorarium penyelenggaraan

kegiatan dan pelatihan.

Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 61 pemda, antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai (BPK RI, 2023).

Menurut Isma Yatun selaku Ketua BPK dalam acara Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I/2023, melaporkan hasil temuan yang menyatakan bahwa terdapat 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Noor & Intan, 2023).

Selain LKPD seluruh tingkat pemerintah di Indonesia, opini BPK juga diberikan pada seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2023 rincian opini audit BPK untuk 28 LPKD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1

Opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat

No	Entitas Pemerintah Daerah	Tahun				
	LKPD	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah	Tahun				
	LKPD	2018	2019	2020	2021	2022
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
23	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas mengenai hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2022, maka didapatkan hasil bahwa masih ada beberapa pemerintah daerah di Jawa Barat yang masih saja mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK selama lima tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh kurangnya bukti atau kesesuaian dan kewajaran antara LKPD dengan SAP (BPK RI, 2023).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arif Agus mengemukakan bahwa pada LHP LKPD Jawa Barat ini ada beberapa temuan yang berulang, yang setiap tahun hampir selalu ada, jadi kami juga menekankan pada Pemda Jawa Barat agar hal itu ditekan, diminimalkan, termasuk dampak-dampaknya. Ada pula temuan

baru. Itu kami minta kepada Pemda Jawa Barat untuk bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan. Tindak lanjutnya juga kalau kami nilai masi 70% masih perlu ditingkatkan lagi.

Beberapa temuan permasalahan signifikan yang menjadi catatan BPK untuk Provinsi Jawa Barat antara lain adalah pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang masih belum memadai, adanya kelebihan pembayara gaji dan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN non aktif, kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jalinan pada dua SKPD, dan penatausahaan aset belum memadai (BPK Jawa Barat, 2023).

Selain itu, BPK mengungkapkan adanya 9.261 temuan yang memuat 15.689 permasalahan sebesar Rp 18,19 triliun. Hal itu meliputi 7.006 (44,6%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 8.626 (55%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 16,92 triliun. Kemudian 57 (0,4%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar 1,27 triliun (Warta pemeriksa BPK, 2023).

Adapun terkait hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat yang masih bermasalah terkait dengan kualitas laporan keuangan yang disebabkan oleh permasalahan penyajian belanja modal di tahun 2021-2022. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa penyajian belanja modal pada Pemkab Bandung masih belum dilakukan

dengan baik, efektif dan efisien sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah kabupaten bandung masih belum maksimal.

BPK juga menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan seperti; penatausahaan aset tetap belum tertib, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan permukiman dari pengembang belum memadai, pengelolaan aset kemitraan pihak ketiga belum sepenuhnya optimal dan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan barang pada BPBD (BPK Jawa Barat, 2023).

Permasalahan ini merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian kualitas laporan keuangan terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga BPK menilai bahwa Pemkab Bandung memegang hasil penilaian sebesar 86% dari BPK terkait laporan keuangan, meskipun penyajian laporan keuangan Pemkab Bandung telah sesuai dengan prosedur operasional dan akuntabilitas namun tetap saja untuk kesesuaiannya penyajian-nya belum maksimal (Dea Duta Aulia, 2023).

Berdasarkan dari fenomena yang terjadi diatas terkait dengan laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sehingga penerapan SAP diperlukan untuk meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2016). Sehingga kualitas laporan keuangan dapat dilihat dan dinilai apabila laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan dapat disesuaikan dengan bukti yang ada (Putriasri, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah Shinta Philadelphia, Sri Suryaningsum dan Sriyono (2020) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah dan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rama Ardianto dan Chermian Eforis (2019) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang)”. Hasil penelitian ini Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas keuangan pemerintah daerah, Sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Siahaya dan Sally Paulina Sandanafi (2019) yang berjudul “*The Effect of Good Governance Implementation, Government Accounting Standards, Effectiveness of Internal Control System and Human Resource Quality on The Quality of Regional Task Force Financial Statements*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance, standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas lapoiran keuangan daerah Kota dan Kabupaten Ambon, Maluku. Sedangkan efektifitas sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kota dan Kabupaten Ambon, Maluku.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusrianti et al. (2021) yang berjudul “Pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten Jayapura” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan SAP Berbasis Akrua, Kompetensi SDM, Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Komitmen Organisasi memoderasi semu (*Quasi Moderator*) dengan memperkuat pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrua terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura, Komitmen Organisasi memoderasi murni (*Pure Moderator*) dengan memperkuat pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Komitmen Organisasi memoderasi murni (*Pure*

Moderator) dengan memperkuat pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dalam penelitian ini. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Dimensi dan indikator pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Abdul Halim (2019:167). Sedangkan pada peneliti sebelumnya menggunakan dimensi dan indikator yang bersumber dari Wijayanti (2018).
2. Dimensi dan indikator pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Mahmudi (2016:253). Sedangkan pada peneliti sebelumnya menggunakan dimensi dan indikator yang bersumber dari Prabowo (2019).
3. Dimensi dan indikator pada variabel kompetensi sumber daya manusia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Sedermayanti (2016:286). Sedangkan pada peneliti sebelumnya menggunakan dimensi dan indikator yang bersumber dari Triyanti (2017)
4. Dimensi dan indikator pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian ini menggunakan dimensi bersumber dari Indra Bastian (2019:48). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi dan indikator yang bersumber dari Prabowo (2019).

5. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di Pemerintah Kabupaten Jaya Pura sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Alasan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bandung karena berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas bahwa Pemkab Bandung mendapat arahan dari BPK terkait belanja modal dan mendapat hasil penilaian sebesar 86% dari BPK terkait laporan keuangan, meskipun penyajian laporan keuangan Pemkab Bandung telah sesuai dengan prosedur operasional dan akuntabilitas namun tetap saja untuk laporan keuangan belum maksimal dan mendapatkan masukan opini dari BPK terkait laporan keuangannya.

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan memberikan hasil yang kurang konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas dan memprediksi apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia akan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Perangkat Daerah Kabupaten Bandung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintahan Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Pemerintahan Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintahan Kabupaten Bandung.
4. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung
5. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

8. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengendalian Internal Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas laporan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta menambah pengetahuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung melalui penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh diantaranya:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta mampu memberikan gambaran bagi pemerintah daerah mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan maupun informasi serta dapat dijadikan referensi sebagai masukan dan acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik lagi.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari masalah yang ada, maka penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang diperoleh berasal dari responden yaitu seluruh pegawai bidang akuntansi dari Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

